Reduksi Resiko Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Pubilk, Pemkab Pasuruan Bekerjasama Dengan Kejari Di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara



Selasa, 21 Mei 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk meminimalisir risiko hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) oleh Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan, Abdi Reza Fachlevi Junus.

MoU ini difokuskan pada bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan diharapkan dapat menekan munculnya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja bersama Perangkat Daerah.

Pj. Bupati Andriyanto menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan wujud ikhtiar bersama dalam mewujudkan good governance. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam menjalankan tugas Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat di era disrupsi saat ini.

Andriyanto juga mengakui bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling belajar dan bertukar informasi antar instansi.

MoU ini merupakan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mencapai pembangunan dan pelayanan publik yang baik serta berdaya saing. Harapannya, kerjasama ini dapat berjalan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi sehingga tujuan kerjasama dapat terwujud.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.